

PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM MEMPERJUANGKAN PROSES PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP

Oleh:

Maretha F. D. B dan Yanuardi M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran partai politik dalam sistem politik, dengan melihat peran PDIP sebagai salah satu aktor dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap bagian barat yang kemudian dipetakan pada sistem politik tahapan keterlibatan partai dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah satu anggota DPC PDIP Cilacap, ketua fraksi PDIP di DPRD Cilacap, ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) dan satu orang warga Kabupaten Cilacap bagian barat. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk mengecek keabsahan data secara mendalam mengenai peran dan keterlibatan partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDIP telah menjalankan beberapa peran partai politik, yaitu komunikator, negosiator, lobbier, dan mediator. Peran tersebut diperankan ketika PDIP melaksanakan fungsi partai politik seperti agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan dalam proses pemekaran wilayah yang dimulai dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada internal partai dan kader partai di DPRD untuk membahas dan menyetujui pemekaran dan menyampaikannya kepada bupati. Mensosialisasikan setiap informasi pemekaran wilayah melalui kampanye partai, reses, temu PAC, pengajian dan beberapa acara lain. Dan menekan konflik selama proses pemekaran wilayah, salah satunya ialah perebutan dua calon ibukota kabupaten baru oleh dua kecamatan di wilayah barat. Dalam sistem politik, PDIP melakukan perannya sampai tahap pembentukan kebijakan pemekaran wilayah tingkat daerah dengan dikeluarkannya SK DPRD dan SK Bupati terkait persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci: *Pemekaran Wilayah, Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sistem Politik.*

I. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan aktor yang menarik dalam pemerintahan, menarik dalam hal status, fungsi, dan koordinasi partai terhadap aktor-aktor lainnya. Peran partai politik mulai hilang seiring dengan berjalannya waktu, hilang karena media atau bahkan memang hilang karena kelemahan anggota yang kurang menjaga eksistensi partai. Selama ini, partai politik ramai dibicarakan hanya lima tahun sekali, yaitu pada saat pra pemilu saja. Partai-partai mulai bermunculan dengan segudang pemberitaan akan keterlibatan partai dalam masyarakat.

Untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa nama rakyat, kader partai seharusnya merupakan orang-orang yang pernah berjuang memperjuangkan rakyat, yang pernah melayani tanpa perlu mendapat imbalan. Beberapa fungsi partai politik memiliki kesamaan dengan fungsi anggota dewan, salah satunya menyerap, dan mendengar aspirasi masyarakat, fungsi inilah yang kemudian terlihat dalam beberapa isu-isu yang muncul dikalangan masyarakat yang memiliki aspirasi untuk pemerintahan, seperti contohnya pemekaran wilayah.

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah otonom yang memiliki beberapa hal untuk dibenahi. Luasnya daerah pemerintahan menimbulkan ketimpangan pelayanan publik di daerah sekitar ibukota kabupaten dengan daerah terluar kabupaten seperti pendapat Parsiyan, anggota dewan dari Kecamatan Sidareja, sebagai berikut.

Jarak Cilacap barat ke Cilacap itu sekitar 120 kilometer. Belum lagi mereka yang tinggal di pedesaan maka harus menempuh perjalanan lebih jauh lagi dan mahal karena sarana transportasi di pedesaan menuju ke jalan raya belum dilalui angkutan umum” (Radar Banyumas, 9 Januari 2007: 9).

Tidak seimbangnya pembangunan antara Cilacap bagian barat dan timur menimbulkan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Cilacap bagian barat jauh tertinggal dibanding Cilacap bagian timur. Kondisi ini menimbulkan

kecemburuan warga di bagian barat dengan memperkuat isu di kalangan masyarakat untuk memekarkan diri. Aspirasi masyarakat untuk memekarkan diri dirasa cukup beralasan dan merasa perlu dilakukan. Semenjak adanya kebijakan pemekaran wilayah, jumlah daerah pemekaran terus bertambah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pemekaran di Indonesia Tahun 1950-2006

Periode	Provinsi	Kabupaten/Kota
1950-1955	6	99
1956-1960	16	145
1961-1965	3	16
1966-1970	1	11
1971-1998	1	33
1999-2006	7	155 (kab. 129, Kota 26)

Sumber : Tri Ratnawati (2009: 13)

Pelaksanaan Pemekaran Wilayah tidak luput dari peran para aktor yang memiliki tugas tersendiri guna menyukkseskan pemekaran wilayah tersebut. Aktor-aktor yang berperan dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Aktor-Aktor dalam Proses Pemekaran Kabupaten Cilacap

NO	NAMA INSTANSI
1.	Pemerintah Daerah
2.	Partai Politik
3.	Perguruan Tinggi
4.	Organisasi Masyarakat
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat
6.	Tokoh Daerah dan Tokoh Keagamaan

Sumber : Paguyuban Warga Cilacap Barat

Tersedianya aktor-aktor yang menindak lanjuti proses ini tidak dapat menjamin lancarnya proses pemekaran di Kabupaten Cilacap. Contohnya, Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013, H. Bibit Waluyomenolak adanya pemekaran di provinsi Jawa Tengah dengan kekhawatiran isu tersebut sengaja dimunculkan oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap pemekaran

Cilacap bagian barat yang ingin menjadi anggota dewan atau bupati. Karena tidak jarang daerah yang dimekarkan justru semakin terpuruk karena tidak ada sokongan sumber daya yang kuat guna pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah baru.

Isu politik menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap. Dari keinginan beberapa kecamatan yang mengunggulkan diri untuk menjadi ibu kota kabupaten baru hingga para pejabat daerah yang akan menduduki kursi pemerintahan baru di Kabupaten Cilacap bagian barat. Pemekaran wilayah akan membentuk sebuah pemerintah baru yang akan memimpin daerah tersebut. Para pemimpin ini lah yang nantinya memiliki andil besar dalam mempertanggungjawabkan daerah hasil pemekaran.

Melihat kedudukan partai politik, partai politik memiliki peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat pemerintahan dimana partai politik merupakan sebuah wadah pertama untuk dijadikannya para pemimpin bangsa. “Partai politik memiliki fungsi *interest aggregation* dan *interest articulation* dimana mereka bertugas untuk menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat dimasyarakat serta menjadi wadah penggabungan aspirasi masyarakat yang senada agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik” (Miriam Budiardjo, 2008:403).

Banyaknya partai politik dalam negara demokrasi memberikan pilihan bagi rakyat untuk memilih partai mana yang telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mereka percayai menjadi wakil dalam pemerintahan. Dari berbagai pilihan, ada satu partai politik yang menarik perhatian penulis karena keaktifan mereka dalam menjalankan aktivitas politik di daerah maupun dukungan terhadap proses pemekaran wilayah dalam dunia maya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cilacap, kekuatan

politik partai PDIP pada pemilu legislatif Tahun 2009 dengan perolehan suara lebih dari 50% di beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap bagian barat. Alasan diatas diperkuat dengan jumlah keterwakilan partai PDIP dalam DPRD Cilacap mendapatkan kursi terbanyak, yaitu 14 kursi anggota dewan.

Pada penelitian ini peneliti ingin memberikan pandangan yang berbeda, seperti penjelasan Miriam Budiardjo (2008:404) bahwa partai politik tidak hanya sekedar aktif dalam pemilu, lebih dari itu partai politik memiliki peran penting dalam melalui proses pelaksanaan pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait peran partai politik bahkan pengetahuan anggota partai yang masih belum paham mengenai peran mereka dalam pemerintahan. Ketidakpahaman inilah yang seringkali membuat kader-kader partai melakukan penyimpangan saat menduduki jabatan pemerintahan karena mereka belum sadar seberapa besar peran yang harus mereka lakukan.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam sistem demokrasi dengan adanya aspirasi masyarakat yang perlu ditindak lanjuti pemerintah. Sejauhmana peran PDIP dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap melalui tahapan sistem politik sebagai salah satu partai yang dipercayai menduduki kursi anggota terbanyak di DPRD Cilacap dan keaktifannya dalam aktifitas politik daerah serta dukungan di dunia maya dalam memberikan informasi pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. Kegiatan apasaja yang dilakukan PDIP dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik dalam pemerintahan sampai pada tahap apa PDIP memperjuangkan aspirasi tersebut jika dilihat dalam sistem politik.

Penelitian yang dilakukan Jacqueline Ratu Marine Kala'suso (2005) dengan judul "Proses Pemekaran Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah", mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada.

Penelitian tersebut menunjukan otonomi adalah penjabaran penting dari tuntutan demokratisasi di segala segi. Dan realisasi otonomi daerah akan sangat

bergantung pada kepercayaan penuh dari pusat dan adanya prakarsa yang kuat dari daerah. Kombinasi antara kepercayaan pusat dan adanya prakarsa dari daerah menjadi kekuatan besar bagi daerah untuk dapat berkembang secara baik dan menjadikan pemerintah daerah sebagai representasi kepentingan masyarakat di daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pemekaran wilayah menjadi salah satu implementasi dari kebijakan otonomi daerah yang memunculkan peluang untuk peningkatan pembangunan namun pada kenyataannya juga memunculkan beberapa konflik kepentingan pasca pemekaran.

Peneliti memilih penelitian tersebut sebagai penelitian yang relevan karena peneliti melihat bahwa dari hasil penelitian tersebut, menjelaskan pemekaran wilayah menjadi sebuah implementasi dari kebijakan otonomi daerah yang dalam prosesnya juga menimbulkan beberapa konflik kepentingan. Konflik kepentingan inilah yang menjadi sorotan, pada penelitian ini penulis membahas konflik tersebut beserta aktor-aktor yang terlibat dan peneliti membahas mengenai peranan salah satu aktor utama dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

II. KAJIAN PUSTAKA

Definisi Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992: 113).

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa

sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008: 403). Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) adalah sebagai berikut.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*) (Miriam Budiardjo, 2008:404).

Kemudian Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut.

Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of govermental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view*)(Miriam Budiardjo 2008:404).

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi Peran

Soekanto (1987: 221) menjelaskan, peran lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002: 342).

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1987: 53) menjelaskan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat peranan, dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Poerwadarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Menurut Bryant dan White (dalam Amira 2010: 9) peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak dapat mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.

Berdasarkan teori diatas, peranan dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang merupakan hak maupun kewajiban yang dilakukan dalam sebuah kondisi bermasyarakat. Jika dipahami dalam konteks peran partai politik, peran yang dimaksud merupakan sebuah status yang berupa tindakan untuk dapat dilaksanakan demi menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan harapan-harapan masyarakat terhadap partai politik.

Peran Partai Politik

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai politik. Peran yang sedang dilakukan partai politik merupakan peranan partai politik saat partai melaksanakan fungsi-fungsi partai yang melekat. Adapun beberapa peran partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut.

a. Komunikator Politik

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan

Nimmo (1989) mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik, yaitu: politikus; professional; dan aktivis.

b. Negosiator Politik

Menurut Stephen Robbins dalam bukunya “Organizational Behavior”, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, karangan Phil Baguley, dijelaskan juga tentang definisi negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.

Pramono (1997) mengacu pendapat dari Folwer menyebutkan bahwa Definisi negosiasi:

“ adalah proses interaksi dengan mana kedua pihak atau yang lebih perlu terlibat secara bersama didalam hasil akhir kendati pada awalnya masing-masing pihak mempunyai sasaran yang berbeda berusaha untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan menggunakan argumen dan persuasi untuk mencapai jalan keluar yang dapat diterima bersama”

Dari definisi tersebut tersirat adanya suatu proses dalam jangka waktu tertentu yang harus diikuti dengan strategi (akan diuraikan pada strategi organisasi). Pelaku negosiasi tersebut ialah yang biasa disebut sebagai negosiator politik.

c. Lobbier Politik

Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam

organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi.

Pengertian lobi menurut AB Susanto (dalam Redi Panuju, 2010 ; 18) adalah:

“Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan Kegiatan melobi bisa jadi sama pentingnya dengan pengembangan kompetensi profesional”

Pada esensinya lobbying dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan tehnik komunikasi untuk mencapai target tertentu. Dibandingkan dengan negosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, lobbying merupakan suatu pendekatan informal. Itulah mengapa negosiator dan lobbyist memiliki peran yang hampir sama. Pelaku lobby politik inilah yang disebut lobbyist politik.

d. Mediator Politik

Menurut Syahrizal Abbas definisi mediasi dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna

mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki fungsi yang melekat sebagai fungsi partai politik seperti fungsi partai politik yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) sebagai berikut.

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan.

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubungan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang

umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) adalah sebagai berikut.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).

A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

c. Rekrutmen Politik

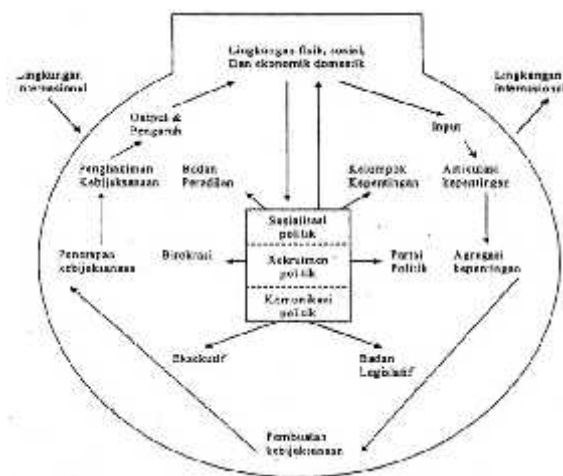
Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pendatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Partai Politik dalam Sistem Politik

Demokrasi tidak hanya melekat secara nasional namun juga di implementasikan ke daerah melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi menguatkan fungsi pemerintah daerah untuk dapat menjalankan demokrasi lokal dengan maksimal. Sistem politik tak lain adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng (*persistent pattern*). Proses tersebut mengandung dimensi waktu (masa lampau, kini dan mendatang). Dari sudut ini terlihat bahwa sistem politik merupakan bagian suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem sosial (A. Rahman H. I, 2007:68). Sistem tersebut digambarkan dalam Diagram Sistem Politik dalam Struktur dan Fungsi Menurut G. A. Almond sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Sistem Politik dalam Struktur dan Fungsi
Sumber: Sistem Politik Indonesia (A. Rahman H. I. 2007:67)

Diagram diatas menggambarkan proses interaksi antar aktor pemerintahan yang masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri dalam pemerintahan. Tiga fungsi utama dalam diagram diatas yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik dilakukan oleh aktor-aktor pemerintahan yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan

badan peradilan untuk melihat kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang kemudian mendapatkan sebuah input yang berupa aspirasi masyarakat yang kemudian diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan di agregasikan oleh partai politik. Setelah itu, hasil dari kegiatan artikulasi dan agregasi kepentingan tersebut dilanjutkan atau diserahkan pada badan legislatif dan eksekutif untuk pembentukan kebijakan yang proses penerapan kebijakannya dilakukan oleh birokrasi dan penghakiman kebijaksanaan tersebut merupakan tanggungjawab badan peradilan. Setelah masing-masing aktor menjalankan fungsinya, kemudian kegiatan tersebut menghasilkan output untuk perbaikan kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik.

Otonomi Daerah

Pasca tumbangnya Soeharto pada tahun 1998 merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat daerah untuk dapat menyuarakan kebutuhan dan keunggulan daerahnya yang sempat terabaikan karena sistem sentralisasi pada masa orde baru. Untuk melandasi Otonomi Daerah, maka disusunlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menganut sistem desentralisasi dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengelola daerahnya sendiri.

Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan pada ayat 6, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut keinginan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur

pemerintah daerah, keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah dalam kewenangan dan keuangan, menjamin rasa kebangsaan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat daerah, dan menciptakan kemandirian daerah (Widjaja, 2002:99-100).

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan salah satu aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah daerah. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (Effendy, 2008: 2).

Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam mengenai peran PDIP dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap dan menjelaskan tahapan keterlibatan PDIP dalam memperjuangkan proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap melalui sistem politik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi seperti untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan partai peneliti meneliti di kantor DPC PDIP

yang beralamat di Jl. Budi Utomo No. 2A Cilacap. Lokasi penelitian yang kedua adalah kantor DPRD Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jl. Jendral Soedirman No. 52 Cilacap, sekretariat Paguyuban Warga Cilacap Barat PWCB yang terletak di Jl. Sunan Kalijaga No. 3 Karangpucung, Cilacap. Dan dua lokasi wawancara yang bertepatan di kediaman anggota DPC PDIP dan Ketua PWCB. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014.

Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa subjek penelitian/ informan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bapak Robin L. Tobing, SH, Sekretaris DPC PDIP Cilacap.
2. Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I, Anggota DPC PDIP Cilacap.
3. Bapak Darimun, Ketua Fraksi PDIP Cilacap.
4. Bapak Abdullah Ahmad M. Zain, SH.I, Ketua Umum PWCB.
5. Bapak Fatkhul Wahab S.Pd.I, Warga Cilacap bagian barat.

Subjek penelitian diatas terdiri dari tiga orang informan kunci pada point satu sampai tiga. Dan dua orang informan pendukung pada poin empat dan lima sebagai informan pembanding untuk memvalidasi data yang diperoleh dari informan kunci. Bapak Fatkhul Wahab dipilih sebagai informan pendukung sebagai wakil dari warga Cilacap barat dipilih berdasarkan beberapa kriteria seperti pendapat-pendapat yang tidak memihak salah satu aktor pemekaran dalam media sosial dan yang terutama karena tempat tinggal yang berada di daerah calon pemekaran.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti sebagai instrumen melakukan validasi terkait persiapan melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan penelitian. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman teori, metode penelitian dan penguasaan mengenai objek yang diteliti yaitu peran partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

Sumber Data

Dalam Moleong (2010:157) dijelaskan bahwa sumber data pokok dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya berupa dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui berbagai tindakan yaitu mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan, dan mencatat semua data dan informasi mengenai peran partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) yaitu “proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis data ini menggunakan empat tahap yaitu : (1) tahap pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan”.

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian lebih dari satu kali dan triangulasi metode dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap sumber lain dengan metode yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dan mengklarifikasi data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yang menjadi sumber data primer yang kemudian dibandingkan dengan hasil data sekunder sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid untuk membantu dalam menganalisis dan mengambil

kesimpulan terkait dengan peran partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap aktor yang terlibat dalam proses pemekaran wilayah khususnya PDIP sebagai salah satu partai politik ini membuka pengetahuan baru bahwa dibalik pemilihan umum dan perebutan jabatan, partai politik memiliki peran yang jauh lebih penting. Larry Diamond menjelaskan (dalam Sutoro Eko 2003:156) betapa pentingnya partai politik dalam negara demokrasi, seperti “kelompok-kelompok kepentingan tidak dapat menampung kepentingan diantara kelompok-kelompok sosial dan isu-isu politik seluas yang bisa dilakukan partai politik” dan “tanpa partai-partai yang efektif yang setidaknya memiliki basis dukungan yang agak stabil, negara-negara demokrasi tidak akan dapat memiliki pemerintahan yang efektif”.

Berikut akan dibahas bagaimana PDIP sebagai partai terkuat di Calon Kabupaten Cilacap Barat menjalankan perannya yang dikerucutkan dalam peran memperjuangkan pemekaran wilayah dan kemudian dipetakan dalam diagram sistem politik dalam struktur dan fungsi mengenai sejauh apa PDIP berperanserta dalam siklus pemekaran wilayah. Peran yang sudah dilakukan PDIP dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap adalah:

a. Komunikator Politik

Berdasarkan klasifikasi komunikator politik milik, Dan Nimmo (1989), dalam proses pemekaran wilayah PDIP dapat diklasifikasikan sebagai politikus. Komunikator politik sebagai politikus terjadi saat anggota fraksi PDIP menyampaikan aspirasi masyarakat kepada fraksi lain di DPRD, yang berhasil diterima dari masyarakat melalui fungsi komunikasi politik yang sudah dilaksanakan.

Klasifikasi komunikator politik yang berikutnya yaitu sebagai aktivis, aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Begitu juga dengan peran yang dilakukan anggota PDIP yaitu Bapak Abbas Rosadi, S.Pd,I

yang pada proses pemekaran wilayah menjadi perwakilan partai yang turut langsung terlibat dalam kegiatan agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan sebagai aktor pemekaran wilayah dan sebagai partai politik yang sudah melaksanakan fungsi komunikasi politik secara informal.

b. **Negosiasi Politik**

Peran negosiasi politik yang dilaksanakan PDIP dalam proses pemekaran berlangsung pada saat melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan menegosiasikan proses pemekaran wilayah kepada beberapa anggota fraksi yang pada saat paripurna kurang setuju dengan pemekaran yang akan diputuskan. Fraksi PDIP melakukan negosiasi supaya terdapat kesepakatan bersama untuk memperjuangkan kepentingan dan keuntungan dari berbagai pihak.

c. **Lobby Politik**

Pada esensinya lobbying dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan teknik komunikasi untuk mencapai target tertentu. Dibandingkan dengan negosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, lobbying merupakan suatu pendekatan informal. Proses lobbying yang dilaksanakan PDIP terjadi pada saat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kabupaten Cilacap dan mengadakan pertemuan dengan DPC PDIP Cilacap. Pada pertemuan tersebut, DPC PDIP melakukan lobbying kepada Gubernur Jawa Tengah dengan meminta bantuan untuk dapat melancarkan proses pemekaran wilayah pada tingkat provinsi. Pada tahap ini, PDIP menjadi kelompok penekan untuk dapat memperjuangkan pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

d. **Mediator Politik**

Peran mediator politik yang dilakukan PDIP jelas terlihat pada saat PDIP menjalankan fungsi pengatur konflik politik. Dalam

menyelesaikan konflik antar kecamatan yang memperebutkan posisi penentuan ibukota kabupaten baru, PDIP melakukan mediasi untuk mempertemukan kedua pihak tersebut dan menengahi dengan memberikan kriteria-kriteria penetapan ibukota kabupaten baru, sehingga masyarakat mengerti bagaimana cara penentuan ibukota kabupaten baru, dan konflik tersebut dapat diselesaikan.

Fungsi partai politik seperti yang ditulis dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik (Miriam Budiardjo, 2008: 405-409) menjelaskan fungsi partai politik yang kemudian dijadikan tolak ukur keberhasilan partai dalam menjalankan perannya melalui pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Cilacap sebagai berikut.

1. Komunikasi Politik

Kegiatan-kegiatan yang sudah PDIP laksanakan dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap digambarkan dalam fungsi komunikasi politik, maka proses *interest aggregation* berlangsung pada saat salah satu warga Kabupaten Cilacap bagian barat menyampaikan aspirasi mereka kepada salah satu anggota partai terkait usulan pemekaran wilayah yang diinginkan warga guna meningkatkan kesejahteraan dan proses *interest articulation* yang dilakukan adalah penekanan aspirasi yang pada saat itu ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan proses pemekaran wilayah, namun karena aspirasi pemekaran lebih banyak diinginkan warga dan banyaknya kader partai yang tinggal di daerah barat pun membuat isu pemekaran wilayah merupakan satu-satunya isu yang dibahas dalam partai. kemudian PDIP membahasnya dalam forum partai dan mengolah aspirasi tersebut dan dirumuskan untuk disampaikan dalam sidang paripurna dalam DPRD. Setiap tahapan tersebut dikomunikasikan kembali kepada masyarakat melalui PWCB sebagai wakil masyarakat di Kabupaten Cilacap bagian barat.

2. Sosialisasi Politik

PDIP melakukan sosialisasi pemekaran wilayah melalui beberapa program rutin maupun insidental partai. Kegiatan tersebut diantaranya kampanye kepada masyarakat, reses, temu rutin PAC, pengajian, kunjungan masyarakat dan dengar pendapat masyarakat dengan selalu menyelipkan tahapan-tahapan pemekaran wilayah, manfaat pemekaran, dan kesiapan daerah untuk mandiri. Ditengah menjalankan tugas utamanya sebagai wakil rakyat, PDIP juga melakukan hal tersebut guna menjaga eksistensi partai dimasyarakat. Kampanye merupakan sebuah tindakan untuk menjaga eksistensi dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa PDIP merupakan wakil yang layak untuk dipilih oleh masyarakat.

3. Rekrutmen Politik

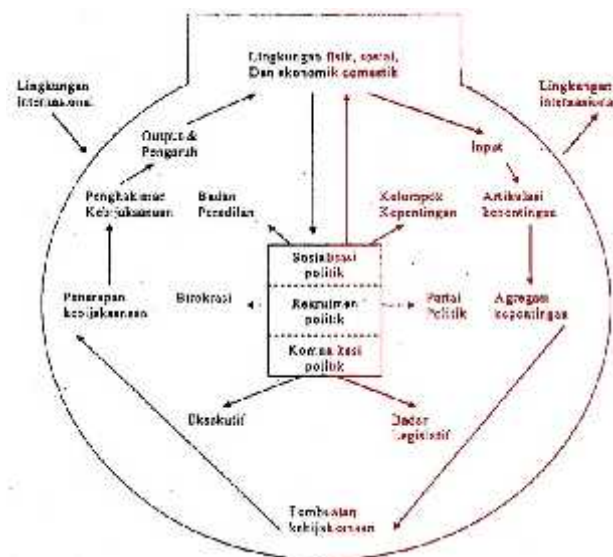
Melihat realita yang terjadi dalam proses pemekaran wilayah, fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal ini tidak dilakukan PDIP. Dalam proses pemekaran, PDIP kurang memanfaatkan kesempatan untuk dapat menciptakan dan mengajak masyarakat menjadi kader-kader yang berkualitas agar dapat mengembangkan partainya. Padahal jika dilihat, proses pemekaran wilayah merupakan peluang besar bagi partai untuk melakukan rekrutmen yang dapat menjaga kontinuitas dan kelestarian partai yang sangat menguntungkan.

4. Pengatur Konflik Politik

Penentuan calon ibu kota baru memunculkan 2 (dua) pilihan yaitu Kota Majenang dan Kota Sidareja. Pilihan ini memunculkan beberapa perbedaan yang menjadi sebuah konflik kecil yang jika tidak ditengahi dengan baik dapat membesar dan menjadi konflik yang berarti. Namun permasalahan tersebut dapat teratasi dengan diskusi secara terbuka dan sama-sama melihat kota mana yang pantas. Sehingga setiap argumen memiliki alasan yang kuat untuk dipertahankan.

Dalam pemekaran wilayah, PDIP mengakui adanya konflik-konflik yang terjadi, salah satunya yaitu konflik diatas. Menurut Lijphart, perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara para pemimpin partai yang kemudian dilakukan oleh PDIP dengan mempertemukan kedua pihak dan melakukan diskusi terbuka terkait ibukota kabupaten mana yang lebih cocok. Dalam hal ini PDIP melakukannya dengan baik dan masyarakat terbantu dengan diskusi tersebut karena tidak akan menimbulkan konflik lagi apabila sudah diselesaikan secara terbuka.

Melihat fungsi dan peran PDIP dalam proses pemekaran diatas maka PDIP sudah dikatakan terlibat aktif didalamnya. Dengan memahami proses pemekaran wilayah dalam sistem politik dapat menggambarkan sejauhmana PDIP memperjuangkan proses pemekaran tersebut. Untuk mengetahui bagaimana tahapan peran PDIP dalam sistem politik melalui proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap akan digunakan diagram sistem politik dalam struktur dan fungsi menurut G. A. Almond sebagai berikut.



Gambar 4. Diagram Sistem Politik dalam Struktur dan Fungsi

Sumber : A. Rahman H.I., 2007: 68

Keterangan : Warna merah merupakan tahapan keterlibatan PDIP dalam proses pemekaran

Diagram diatas dapat dipahami bahwa warna merah dalam siklus tersebut merupakan aktivitas PDIP dalam proses pemekaran wilayah, hal yang mendasar adalah dengan melaksanakan proses sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik dalam lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Tiga fungsi tersebut kemudian menjadi tanggung jawab badan peradilan, birokrasi, eksekutif, badan legislatif melalui kader PDIP yang menduduki kursi DPRD, partai politik melalui DPC PDIP Cilacap, dan kelompok kepentingan pada saat proses pemekaran sampai pada tingkat provinsi. Kemudian memperoleh input dari hasil sosialisasi dan komunikasi pemekaran yang ditampung dalam proses artikulasi kepentingan, dan digabungkan sesuai dengan jenis aspirasi yang diterima sehingga mengurangi kesimpangsiuran pendapat yang selanjutnya dipilih aspirasi mana yang memang pantas untuk diputuskan sebuah kebijakan yang kemudian diterapkan, dievaluasi, dan dilihat output apa yang dapat mempengaruhi peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik.

Dalam konteks fungsi PDIP dalam pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Cilacap, dua dari tiga fungsi diatas sudah dilaksanakan PDIP dengan baik, meskipun ada satu fungsi yang tidak terlaksana yaitu rekrutmen politik. Kelalaian ini lah yang membuat kinerja PDIP kurang maksimal. Dalam komunikasi politik, PDIP sudah melakukan penyerapan hingga pengolahan aspirasi tersebut dengan maksimal dan berhasil mengangkatnya sampai dengan pemerintah daerah melalui wakil mereka dalam badan legislatif daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, PDIP sebagai partai politik dibantu oleh beberapa kelompok kepentingan seperti PWCB, Tokoh-tokoh agama, Kaukus Cilacap barat, Aliansi Masyarakat Peduli Pemekaran Kabupaten Cilacap (AMPPKC), dan beberapa organisasi masyarakat yang mendukung.

Pemekaran wilayah seperti yang sudah dijelaskan diatas juga melalui beberapa tahap yang didalamnya melibatkan beberapa aktor seperti badan peradilan, BPD, badan legislatif melalui anggota PDIP yang duduk di fraksi

maupun yang saat itu menjabat sebagai ketua DPRD setempat dengan mengeluarkan surat dukungan Nomor: 146.1/16/13/2010, yang kemudian disampaikan pada bupati sebagai badan eksekutif daerah yang sudah menerbitkan surat keputusan Nomor: 136/221/01/Tahun 2010 untuk menyetujui proses pemekaran wilayah yang kemudian disampaikan ke provinsi dan dimohon untuk ditindak lanjuti pemerintah pusat.

Setelah siklus inti tersebut terlaksana, sosialisasi, rekrutmen, dan komunikasi politik dapat menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi Kabupaten Cilacap bagian barat yang kemudian melahirkan beberapa aspirasi salah satunya pemekaran wilayah. Kemudian aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui proses artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan partai politik dalam peran komunikasi politik. Melalui wakil partai yang duduk di DPRD, kemudian aspirasi pemekaran wilayah tersebut dirumuskan menjadi sebuah kebijakan daerah yang sudah disetujui oleh bupati dan sudah diberikan kepada gubernur untuk ditindak lanjuti.

Pada tahap pembuatan kebijakan ini DPC PDIP Cilacap merasa sudah tidak bisa melakukan perjuangan langsung selain memantau sampai akhirnya kebijakan tersebut disahkan. Namun pada saat proses pemekaran sampai pada tingkat provinsi, PDIP dapat menjadi kelompok kepentingan dimana perannya hanya memantau dan menekan DPRD maupun Gubernur untuk menindaklanjuti. Terpilihnya Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah mempermudah PDIP dalam memperjuangkan pemekaran wilayah karena berasal dari satu partai yang sama. Bahkan pada saat kunjungan gubernur ke Kabupaten Cilacap, PDIP sempat membuat pertemuan dengan gubernur yang didalamnya juga membahas proses pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap akan dipermudah karena syarat dasar pembentukan wilayah baru sudah dipenuhi.

Jika dilihat secara konstitusional, PDIP sudah sangat baik memperjuangkan peran-perannya yang kemudian mereka lanjutkan melalui

kader partai di DPRD. Sehingga secara struktural akan sangat membantu proses tersebut. Setelah pemekaran ini ditetapkan diharapkan monitoring kebijakan dan evaluasi pemekaran tetap dilaksanakan dengan keterlibatan partai politik khususnya PDIP yang sudah mengawal proses tersebut dari awal untuk terlibat secara konstitusi maupun nonkonstitusi. Sehingga dapat menghasilkan output seperti tujuan utama yang selama ini diharapkan. Melalui output tersebut akan memunculkan lingkungan fisik, sosial, dan domestic yang baru yang lebih baik.

Secara umum, DPC PDIP Cilacap sudah mengawal isu pemekaran sampai isu tersebut berkembang menjadi sebuah proses yang harus dilaksanakan. Mulai dari menyerap, membahas, menyampaikan dalam paripurna di DPRD, yang kemudian DPRD mengeluarkan surat dukungan dalam surat Nomor 146.1/16/13/2010 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Cilacap, kemudian menyampaikannya kepada bupati untuk menyetujui, dan bupati menyetujui dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor: 136/221/01/2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cilacap, sampai akhirnya saat ini usulan tersebut sudah sampai di tahap provinsi yang akan ditindaklanjuti ke pusat. Sehingga dalam siklus pemerintahan PDIP sampai pada tahap pembuatan kebijakan tingkat daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian

Peran yang dilakukan PDIP dalam proses pemekaran wilayah adalah komunikator, negosiator, lobbier, dan mediator. Peran-peran tersebut terlihat dengan dilaksanakannya fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, dan pengatur konflik politik. Tindakan pertama yang dilakukan PDIP ialah melakukan kegiatan artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dimulai dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada internal partai dan disampaikan melalui kader partai yang duduk di DPRD untuk membahas dan menyetujui pemekaran dengan keluarnya SK DPRD Nomor 146.1/16/13/2010 dan menyampaikan kepada

bupati sampai akhirnya bupati mengeluarkan SK persetujuan pemekaran dengan Nomor 136/221/01/Tahun 2010.

Mensosialisasikan setiap informasi pemekaran wilayah kepada masyarakat juga dilakukan PDIP melalui kampanye partai, reses, temu PAC, pengajian dan beberapa acara lain yang mempertemukan PDIP dengan masyarakat. Penekan konflik juga dilakukan dengan mendiskusikan pro kontra calon ibukota kabupaten baru. Sepanjang proses pemekaran wilayah, PDIP juga ikut aktif dalam setiap pertemuan organisasi masyarakat maupun tokoh agama dalam pembahasan pemekaran wilayah termasuk pertemuan dengan beberapa kabupaten hasil pemekaran sebelumnya untuk saling berbagi informasi pemekaran wilayah. Penengah konflik penentuan kecamatan calon ibukota kabupaten yang baru juga dilaksanakan dengan kegiatan mediasi. Kegiatan diatas sudah mencakup peranan partai politik secara menyeluruh terkecuali fungsi rekrutmen politik.

Peran PDIP dalam sistem politik sampai pada tahap pembuatan kebijakan pemekaran wilayah tingkat daerah dengan dikeluarkannya SK Persetujuan Pemekaran Wilayah DPRD dan SK Persetujuan Pemekaran Wilayah Bupati yang kemudian menjadi kelompok kepentingan pada tingkat provinsi maupun pusat dengan menekan pemerintah untuk menyetujui pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. DPC PDIP Cilacap hanya dapat memaksimalkan usaha mereka pada tahapan daerah dan hanya bisa memantau proses tersebut sebagai kelompok kepentingan saat tugas perangkat daerah sudah selesai dan diserahkan pada tingkat provinsi yang nantinya akan disahkan pada pemerintah pusat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran PDIP dalam memperjuangkan proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap, peneliti memberikan saran kepada DPC PDIP Cilacap untuk mempersiapkan kader dengan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan pakar politik jika perlu, sehingga para kader sadar apasaja peran mereka. DPC PDIP Cilacap membenahi organisasi internal terlebih dahulu dengan memperjelas kembali

visi, misi, tujuan, tugas, dan fungsi partai yang kemudian direalisasikan melalui rencana kerja dalam periode tertentu dengan mempertimbangkan output dari kegiatan politik yang dilakukan. Dengan melakukan kegiatan rutin yang berlatar belakang politik, maka secara tidak langsung partai sudah memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat dan menumbuhkan kembali peran partai dalam negara demokrasi.